

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang”.

Latar Belakang Masalahnya adalah Utang dalam dunia usaha suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Karena kepailitan merupakan salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini : Untuk mengetahui pelaksanaan PKPU bagi pihak Debitur dan kreditur dalam perjanjian sewa menyewa. Dan mengetahui akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kedudukan hukum Debitur dalam perjanjian sewa menyewa menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Metode pendekatan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan PKPU bagi pihak Debitur dan kreditur dalam perjanjian sewa menyewa dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal pelaksanaan PKPU: a) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga b) Panitera kemudian mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang diajukan, dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat sesuai tanggal pendaftaran c) Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi. d) Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. e) Selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 2) Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kedudukan hukum Debitur dalam perjanjian sewa menyewa menurut UU Nomor 37 Tahun 2004. a) Debitur bertindak sebagai penyewa suatu barang setelah PKPU dimulai dengan kewenangan dari pengurus dapat mengakhiri sewa sementara menurut kebiasaan setempat. b) Pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam Bab III.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Perjanjian, Sewa-Menyewa

ABSTRACT

Thesis with the title "Effects Delays Payment Obligation Debt to Lease Agreement According to Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Pay Debt".

Background The problem is debt in the business world a common practice by individual and corporate businesses. An attempt does not always run smoothly, so as to arrive at a state stopped paying, that is a situation where businesses can no longer afford to pay off debts that have matured. Because bankruptcy is a legal means for the settlement of debts in a fast, fair, open, and effective.

The purpose of this research: To investigate the implementation PKPU Debtor and creditor for the parties in the lease agreement. And knowing the legal consequences delay debt payment obligations towards the legal position of the debtor in the lease agreement under the Act No. 37 2004.

The method in this research is normative juridical approach, namely to examine the sources of literature relevant to the theme of research, including research on the principles of law, sources of law, legislation scientific theoretical and can analyzing the issues discussed.

The study concluded that: 1) Implementation of PKPU for the Debtor and creditor in the lease agreement with the enactment of the provisions of Article 6 paragraph (1) through (5) of Law Number 37 of 2004, in terms of the implementation PKPU: a) To be proposed to Chair Commercial court b) the Clerk then register the request PKPU on the application, and the applicant is given a receipt, which is signed by the appropriate official registration date c) the Registrar shall refuse to register PKPU for the institution. d) Registrar PKPU submit application to the Chairman of the Commercial Court no later than 2 days after the date the application is filed. e) No later than 3 days after the date the request is registered, the Court studied the request and set a hearing date. 2) As a result of the legal delay debt payment obligations towards the legal position of the debtor in the lease agreement according to Law Number 37 Year 2004 a) The Borrower acts as lessee of goods after PKPU begins with the authority of the board may terminate the lease while according to local habits. b) Regulation on Suspension of Payment in Indonesia Bankruptcy Law contained in Law No. 37 of 2004 in Chapter III.

Keywords: Effects, Delays Debt Payment Obligation, Agreement, Lease-rental